

ANALISIS KESENJANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI PROPINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 1997-2001

SKRIPSI



Buku DPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh : *Dudung Danca Setiawan*  
Terima : *fat* : Hadiah  
Pembelian  
Tgl. 02 OCT 2003  
No. Induk : *fat*

S  
Klass  
338.9  
SET  
a

c.1

*Dudung Danca Setiawan*

IESP/990810101357

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER

2003

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KESENJANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN / KOTA  
DI PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 1997 - 2001

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : DUDUNG PANCA SETIAWAN

N. I. M. : 990810101357

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

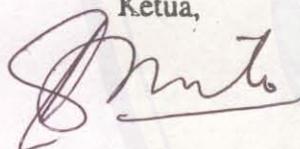
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

09 AGUSTUS 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

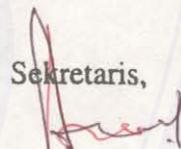
Ketua,



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 131 610 494

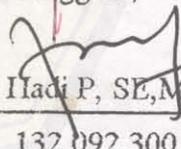
Sekretaris,



Drs. Rafael Purto S., M.Si

NIP. 131 793 384

Anggota,

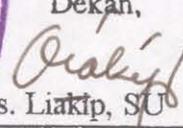


Teguh Hadi P., SE, M.Si

NIP. 132 092 300



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



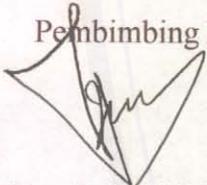
Drs. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

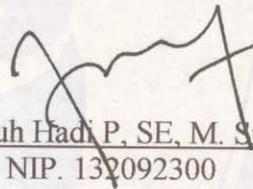
Judul Skripsi : Analisis Kesenjangan Spasial Antar Kabupaten/ Kota di  
Propinsi Jawa Timur Tahun 1997-2001  
Nama : Dudung Panca Setiawan  
NIM : 990810101357  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



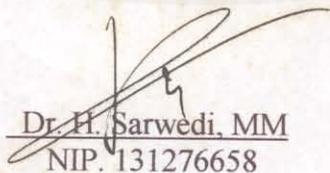
Drs. Zaipuri, M. Si  
NIP. 131832336

Pembimbing II



Teguh Hadi P, SE, M. Si  
NIP. 132092300

Ketua Jurusan



Dr. H. Sarwedi, MM  
NIP. 131276658

Tanggal Persetujuan : Juli 2003

MOTTO

*Tiada Tuhan Selain Allah*

“ Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayamu”(QS 35:5).

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu.....amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (QS At-Taubah : 128)

Kalau hati pulih menjadi sehat, dan bersihkan dari segala hawa nafsu  
Kemudian “*Tuhan Yang Maha Pengasih bersemayam di singgasana*”(QS 20:5)

Setelah itu, Dia langsung membimbing hati selama hati bersama Dia

Semangat manusia intinya Satu

Karena *Allah membimbing cahaya-Nya*

*Kepada siapa saja yang Dia mau (QS 24:35),*

Pada dasarnya mereka adalah Satu

Cahaya-nya tak pernah benar-benar terpisah

(Maulana Jalaluddin Muhammad)

Perbanyaklah oleh kita membaca Shalawat  
Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW  
sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih  
atas syafa'at beliau di akherat nanti

**Halaman Persembahan**

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk :

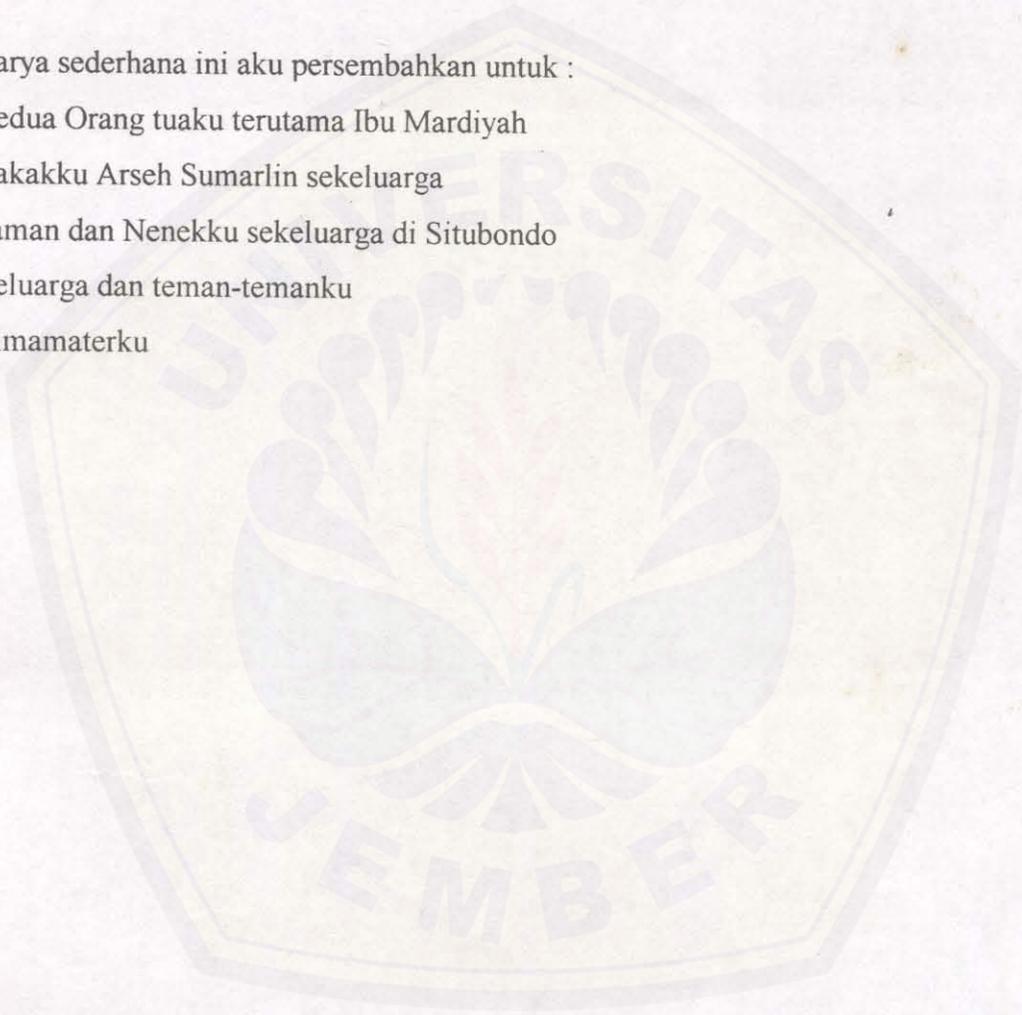
Kedua Orang tuaku terutama Ibu Mardiyah

Kakakku Arseh Sumarlin sekeluarga

Paman dan Nenekku sekeluarga di Situbondo

Keluarga dan teman-temanku

Almamaterku



## Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan spasial yang ada di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan alat analisis Indeks Entropy Theil, Tipologi Klassen, dan Pertumbuhan Ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 1997-2001.

Hasil Indeks Entropy Theil dengan nilai antara 0,4 - 0,6 menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur terdapat kesenjangan walaupun bernilai sangat rendah dan mengalami fluktuasi yang relatif kecil. Sedangkan analisis Tipologi Klassen dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa terdapat empat Kabupaten/ kota merupakan daerah cepat tumbuh dan maju, empat Kabupaten/ Kota merupakan daerah maju tapi tertekan, sebelas Kabupaten/ Kota merupakan daerah tertinggal, satu daerah PDRB perkapitanya sama dengan PDRB perkapita rata-rata Jawa Timur tetapi pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan Jawa Timur, dan lainnya merupakan daerah yang berkembang cepat.

Selain itu pada periode tahun 1998 pertumbuhan yang ada di Propinsi Jawa Timur bernilai negatif. Ini dikarenakan pada periode 1997-2001 merupakan masa krisis yang dialami Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. Dengan industri menjadi penyumbang paling besar untuk pertumbuhan maka krisis yang berakibat langsung pada sektor industri berskala besar menyebabkan sektor ekonomi terutama industri mengalami depresi.

Kata Kunci : Kesenjangan Spasial, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya semata skripsi dengan judul Analisis Kesenjangan Spasial Propinsi Jawa Timur ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam mengatasi berbagai macam hambatan terutama keterbatasan penulis dan data. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Zainuri, M.Si dan Teguh Teguh Hadi P, SE, M.Si atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf.
3. Drs. Rafael Purnomo, M.Si dan Zaenal Arifin, SE, M.Si atas bimbingan informalnya.
4. Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan IESP yang telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas jember.
6. KH. Abdul Warist atas bimbingan rohani dalam menyikapi kehidupan dunia dan akherat.
7. Keluarga di Pasuruan : Ibu, Mbak Seh, Mas 'Ari, dan Kemenakanku Rizki, Rizka, dan Fatimah.
8. Saudara-saudaraku mengaji : KH. Rusdi, Kyai Makdum, Mas Har, Pak Imam, Ustadz Ali, Ustadz Yahya, Gus Makrus, Mas Budi, Mas Ahmad, ghofar, Agus, Egos dll.
9. Keluarga di Situbondo ; Paman dan Bulek Imam, Simbah, dan Ayub.
10. Pak Rudi, Yusli, Iwan Abdullah, Mas Widya, dan Mas Eko.
11. Teman-teman asrama ; bang Tang, cak Gun, om Bash, pak Eko, Nizar, Pur, Yusuf, Prist dan Juli, Agung Bo, Moyan, Andi slank, Budi riff, Yus dan Dion.

12. Teman-teman Salaf ; Irwan, Iman, Mas Hamam, Sidiq, dan Qosim.
13. Teman-teman di kost-an Nias ; Hendra, Uqi', Arik, Sapto, DQ, Doni dan Andre.
14. Uyunur R, Diana AH Dini, Indri W, Nunung yang memberiku arti pengetahuan dan pengalaman.
15. Teman-teman Imapas dan teman-teman kelasku "SP Ganjil".
16. Dan masih banyak lagi pihak-pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkeinginan menambah khasanah keilmuannya.

Jember, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah.....	8
2.2.2 Indeks Entropy Theil.....	8
2.2.3 Analisis Tipologi Klassen .....	9
2.2.4 Teori aglomerasi.....	12
2.2.5 Konsep Wilayah .....	15
2.2.6 Teori Komunikasi dalam Perkembangan kota .....	18
2.2.7 Teori pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2.8 Teori Tempat Sentral.....	21
2.2.9 Produk Domestik regional Bruto (PDRB).....	22

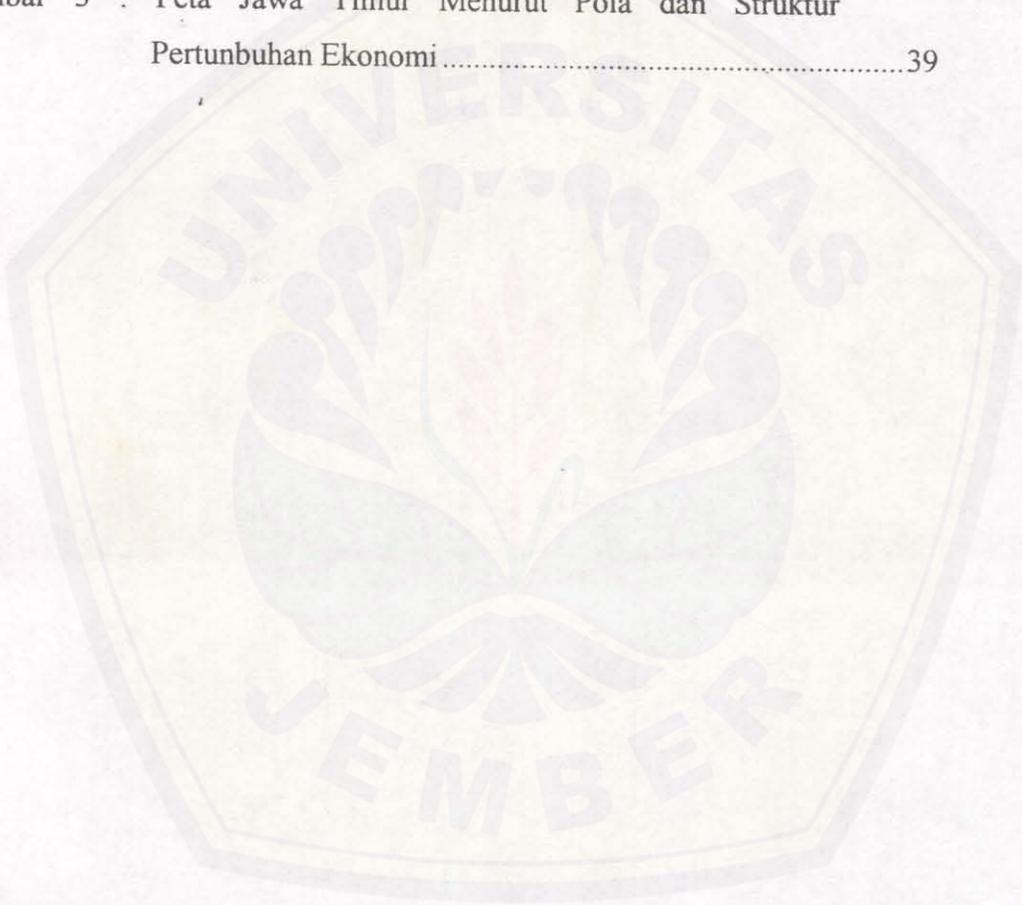
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	24
3.1.1 Jenis Penelitian.....	24
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.2 Populasi .....	24
3.3 Metode Analisis Data.....	24
3.3.1 Indeks Entropy Theil.....	24
3.3.2 Analisis Tipologi Klassen .....	25
3.3.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi.....	26
3.4 Definisi Operasional.....	27
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Yang Diteliti.....	28
4.1.1 Keadaan Geografis .....	28
4.1.2 Penduduk.....	28
4.1.3 Kondisi Industri Pengolahan .....	29
4.1.4 Struktur Ekonomi.....	30
4.1.5 PDRB Perkapita .....	32
4.2 Analisis Data .....	32
4.2.1 Analisis Indeks Entropy Theil.....	32
4.2.2 Analisis Tipologi Klassen .....	33
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi.....	35
4.3 Pembahasan.....	37
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Perubahan Peringkat Atas Dasar Kabupaten/ Kota Jawa Timur Harga Konstan Tahun 1998 dan 2001 (000 000) .....	4
Tabel 2 : Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen.....	17
Tabel 3 : Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen.....	26
Tabel 4 : Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri.....	29
Tabel 5 : Profil Industri di Jawa Timur Tahun 2000 – 2001 .....	30
Tabel 6 : Banyaknya Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Pertaniannya Tahun 2001 .....	31
Tabel 7 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Propinsi Jawa Timur Mulai Tahun 1997 – 2001 .....	33
Tabel 8 : Hasil Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jawa Timur Tahun 1997 – 2001 .....	33
Tabel 9 : Rata – Rata Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur Dari Tahun 1997 – 2001 .....	36

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Proses Kausalitas Kumulatif Yang Positif Versi Myrdal (1957) dan Pred (1965).....	9
Gambar 2 : Kausalitas Kumulatif Negatif Menurut Yang Negatif Menurut Versi Myrdal dan Pred.....	12
Gambar 3 : Peta Jawa Timur Menurut Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jumlah Penduduk Per Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 1997-2001 .....	43
Lampiran 2 : Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 1997-2001 .....	44
Lampiran 3 : PDRB Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 1997-2001 .....	45
Lampiran 4 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1997 .....	46
Lampiran 5 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1998 .....	47
Lampiran 6 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1999 .....	48
Lampiran 7 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 2000 .....	49
Lampiran 8 : Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 2001 .....	50
Lampiran 9 : Hasil Analisis Tipologi Klassen .....	51
Lampiran 10 : Diskripsi Analisis Tipologi Klassen .....	52
Lampiran 11 : Gambar Peta Jawa Timur .....	53

## I. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Prioritas pembangunan nasional disusun untuk melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan GBHN 1999-2004 guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional menjadi dasar arah dari kebijakan yang dilaksanakan. Artinya bahwa tidak hanya pertimbangan sektoral yang harus diperhatikan tetapi pertimbangan regional juga penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan arahan GBHN 1999-2004, maka pembangunan lintas wilayah menjadi salah satu upaya untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan. Hal ini diharapkan mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya pemukiman perkotaan, pedesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal.

Arsyad (1999 : 108) menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Pembangunan ekonomi akan membawa (inherent) ketimpangan regional apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, sehingga untuk menghindari hal tersebut strategi yang diambil adalah dengan perencanaan pembangunan (Tim P4N-UGM dan BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, 1997 : 1-2).

Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah kabupaten dan kota dalam mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi semakin penting saat ini. Perubahan sosial-ekonomi menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial

(Rodriguez-Pose, 1998 : bab 3). Hal ini dikarenakan suatu wilayah mengalami proses aglomerasi atau eksternalitas yang di dalamnya terdapat industri sebagai unsur mikro.

Dalam proses pertumbuhannya yang kompleks, kota lebih penuh dengan gejala sosial-kultural daripada gejala ekonomi sehingga tidak dapat dijelaskan semata-mata dari segi ekonomi. Untuk menjawab hal ini menuntut adanya campur tangan pemerintah dalam tingkat regional yang umumnya berupa perencanaan regional. Suatu kota atau pusat kota tidak dapat direncanakan secara terpisah dari daerah sekitarnya dimana berdasarkan pertimbangan phisik, ekonomi, dan sosial tindakan tersebut harus dipahami serta direncanakan dalam konteks regionalnya. Konsentrasi dan ketimpangan (unevenness) secara spasial yang merupakan ciri paling mencolok aktifitas ekonomi secara geografis ditunjukkan oleh proses selektif industrialisasi. Aktifitas ekonomi secara spasial biasanya merujuk pada dua macam eksternalitas ekonomi yang dinamakan penghematan lokasi (localisation economies) dan penghematan urbanisasi (urbanisation economies) (Henderson, 1998; O'Sullivan, 1996). Kedua macam penghematan ini lebih sering disebut agglomeration economies yang secara implisit memperlihatkan hubungan antara industrialisasi dan urbanisasi dalam proses pembangunan

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan kenaikan GNB dan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan. Secara makro keadaan pertumbuhan ekonomi suatu daerah lazimnya ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) walaupun mengandung kelemahan, akan tetapi sampai sekarang indikator ini masih tetap digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan perkembangan dari tahun ke tahun. Pemberlakuan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan yang ada dapat diperkecil.

Adanya UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, mengatur penataan/pengaturan ruang lingkup nasional. Sedangkan untuk penataan ruang bagi wilayah

Propinsi dan Kabupaten/ Kodya menurut UU tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak dan kewenangan mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perbedaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan wilayah akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata menghambat pertumbuhan wilayah secara regional, sehingga wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.

Dilihat dari kontribusi Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 1998 dan 2001 terjadi perubahan peringkat dalam penciptaan nilai tambah kota/ kabupaten di Jawa Timur. Dari tabel tersebut dapat dilihat sejak tahun 1998 sampai dengan 2001 peringkat tertinggi ditempati oleh Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya mempunyai potensi yang sangat besar dalam menciptakan nilai tambah di Jawa Timur sehingga posisinya sulit tergeserkan oleh Kabupaten/Kota lainnya. Berikut tabel peringkat PDRB kabupaten/ kota atas dasar harga berlaku tahun 1998 dan 2001.

Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa terdapat ketidakmerataan hasil dari proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Perbedaan kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan yang tampak pada tabel 1 merupakan perwujudan ketimpangan atau kesenjangan spasial (regional) yang terdapat pada propinsi Jawa Timur. Setiap daerah kabupaten/ kota memiliki perbedaan sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan tersebut menjadi awal dari berbedanya hasil pembangunan yang dicapai. Pada akhirnya kesenjangan atau ketimpangan spasial (regional) propinsi Jawa Timur akan semakin tinggi.

Tabel 1. Perubahan Peringkat PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998 dan 2001 (000 000)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Tahun 1998		Kabupaten/Kota	Tahun 2001	
		Kontribusi	Kontribusi		Kontribusi	Kontribusi
1	Kota Surabaya	20,71	Kota Surabaya	20,34		
2	Kota Kediri	9,94	Kota Kediri	9,05		
3	Kab. Sidoarjo	8,2	Kab. Sidoarjo	8,13		
4	Kab. Gresik	5,11	Kab. Gresik	5,58		
5	Kab. Pasuruan	4,51	Kab. Pasuruan	4,47		
6	Kab. Malang	4,2	Kab. Malang	4,45		
7	Kota Malang	3,82	Kota Malang	3,69		
8	Kab. Jember	3,34	Kab. Jember	3,37		
9	Kab. Banyuwangi	3,11	Kab. Banyuwangi	3,12		
10	Kab. Tuban	2,59	Kab. Tuban	2,56		
11	Kab. Kediri	2,53	Kab. Kediri	2,49		
12	Kab. Probolinggo	2,29	Kab. Tulungagung	2,35		
13	Kab. Tulungagung	2,07	Kab. Probolinggo	2,22		
14	Kab. Mojokerto	1,94	Kab. Mojokerto	1,96		
15	Kab. Sumenep	1,79	Kab. Jombang	1,83		
16	Kab. Jombang	1,78	Kab. Lamongan	1,77		
17	Kab. Lamongan	1,72	Kab. Lumajang	1,74		
18	Kab. Lumajang	1,66	Kab. Bojonegoro	1,66		
19	Kab. Bojonegoro	1,57	Kab. Sumenep	1,59		
20	Kab. Nganjuk	1,4	Kab. Blitar	1,47		
21	Kab. Blitar	1,38	Kab. Nganjuk	1,38		
		1,3		1,33		

22	Kab. Situbondo	1,19	Kab. Situbondo	1,28
23	Kab. Ngawi	1,18	Kab. Ponorogo	1,23
24	Kab. Bangkalan	1,18	Kab. Ngawi	1,21
25	Kab. Ponorogo	1,14	Kab. Sampang	1,15
26	Kab. Sampang	1,08	Kab. Bangkalan	1,13
27	Kab. Bondowoso	1,05	Kab. Bondowoso	1,11
28	Kab. Magetan	0,94	Kab. Magetan	0,99
29	Kota Probolinggo	0,9	Kab. Madiun	0,9
30	Kab. Madiun	0,89	Kota Probolinggo	0,84
31	Kab. Pamekasan	0,7	Kab. Pamekasan	0,75
32	Kota Madiun	0,69	Kota Madiun	0,72
33	Kab. Trenggalek	0,68	Kab. Trenggalek	0,68
34	Kab. Pacitan	0,53	Kab. Pacitan	0,56
35	Kota Pasuruan	0,47	Kota Pasuruan	0,5
36	Kota Mojokerto	0,41	Kota Mojokerto	0,41
37	Kota Bitar	100	Kota Bitar	100
<b>Propinsi Jawa Timur</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2001

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kesenjangan di Propinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Timur?
3. Dimana lokasi-lokasi pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesenjangan yang ada di propinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengidentifikasi lokasi pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Empirik

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil pembangunan regional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi para pelaku ekonomi pada umumnya dan pemprov pada khususnya.

2. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu tambahan wawasan dan wacana dalam khasanah keilmuan terutama ilmu ekonomi pengembangan regional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA



### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Esmara (dalam Zaenal, 1975:6) melakukan analisis ketimpangan/kesenjangan antar daerah di Indonesia dengan menggunakan koefisien disparitas Williamson dari PDRB perkapita. Di luar propinsi penghasil migas (Riau, Kaltim, dan Kalteng) secara umum ketimpangan antar daerah jauh lebih rendah dibandingkan jika daerah tidak memasukkan migas. Tetapi selama periode 1968-1972 baik dengan migas maupun tanpa migas ketimpangan daerah cenderung meningkat dari 0,340 menjadi 0,522.

Setyarini (dalam Zaenal 1999:7) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Propinsi Jawa Tengah periode 1983-1995, dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas memberi kesimpulan bahwa ketimpangan/kesenjangan pembangunan di Jawa Tengah semakin melebar dan trendnya meningkat meskipun skalanya relatif kecil. Selain itu dinyatakan bahwa variabel persentasi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh memperlebar kesenjangan, sedangkan pengeluaran pemerintah akan memperkecil kesenjangan.

Kuncoro (2000:90-91) menganalisa kesenjangan spasial antar pulau dan dalam satu pulau, dihitung untuk 27 propinsi di Indonesia dan 5 pulau utama selama periode 1976-1995 dengan variabel pangsa tenaga kerja industri memberi kesimpulan indeks entropy total memberikan indikasi sangat tingginya konsentrasi spasial selama periode 1976-1995 yaitu rata-rata 2,5. Angka rata-rata ini jauh lebih tinggi daripada indeks entropy untuk negara maju dan berkembang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Theil terhadap 100 negara di AS, Eropa Barat, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Studi tersebut menemukan indeks entropy berkisar antara 0,53 hingga 0,65 selama periode 1980-1985.

Untuk antar pulau indeks entropy mulai naik secara bertahap sejak tahun 1988, yang menunjukkan adanya trend meningkatnya konsentrasi spasial di

beberapa pulau terutama pulau bagian barat Indonesia khususnya Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk dalam satu pulau indeks entropy mulai naik pada periode 1985 yang dapat diartikan bahwa derajat perbedaan antar propinsi pada setiap pulau dilihat dari pangsa tenaga kerja industri cenderung meningkat.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah**

Pengertian wilayah daerah lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah nasional, bila dilihat dari pergerakan sumber daya antar daerah lebih bebas dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar negara. Pergerakan sumber daya – sumber daya yang lebih bebas dimaksud, karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor hampir dikatakan tanpa hambatan dalam pergerakannya antar daerah. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitiktolak dari kenyataan itu, Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

### **2.2.2 Indeks Entropy Theil**

Menurut Kuncoro (2001:87) bahwa konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Pada mulanya alat analisis ini diperkenalkan oleh Henri Theil dalam menganalisis perilaku produksi mobil baru di Amerika Serikat selama tahun 1936-1964 dan tahun 1959-1964. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan

pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia.

Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001:87). Dalam konteks ini indeks entropi dapat dinyatakan dalam (Zaenal A, 2003:18) :

$$I(y) = \sum (y_j/Y) x \log \left[ \frac{(y_j/Y)}{(x_j/X)} \right]$$

Dimana :

- I(y) = indeks entropi Theil
- y<sub>j</sub> = PDRB per kapita kabupaten j
- Y = rata-rata PDRB per kapita Jawa Timur
- x<sub>j</sub> = jumlah penduduk kabupaten j
- X = jumlah penduduk Jawa Timur

Jika I(y) > 1 maka tingkat kesenjangan tinggi;

Jika I(y) antara 0 - 1 maka tingkat kesenjangan rendah;

Jika I(y) < 0 maka tidak ada kesenjangan.

### 2.2.3 Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi

menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro, 1993: Hill, 1989).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur; (3) daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur; digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

**Tabel 2. Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen**

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB per kapita (y)	
	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	Daerah berkembang Cepat	Daerah cepat maju dan Cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah relatif Tertinggal	Daerah maju tapi Tertekan

Sumber : Prisma (1997:23)

Keterangan :  $r_i$  = laju pertumbuhan PDRB kabupaten  $i$   
 $r$  = laju pertumbuhan total PDRB Jawa Timur  
 $y_i$  = pendapatan perkapita kabupaten  $i$   
 $y$  = pendapatan perkapita Jawa Timur

## 2.2.4 Teori Aglomerasi

Aglomerasi merupakan konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*).....yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Ini senada dengan Markusen (dalam Kuncoro 2000:24) yang menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain serta penyedia jasa-jasa. Proses aglomerasi ini akan menyebabkan kesenjangan regional karena di dalamnya terdapat eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.

### 2.2.4.1 Teori Klasik

Ditinjau dari pendekatan aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep "penghematan aglomerasi" melalui konsep eksternalitas penghematan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Penghematan internal adalah suatu pengurangan biaya secara internal di dalam suatu perusahaan atau pabrik. Beberapa faktor yang berperan dalam pengurangan biaya secara internal meliputi : pembagian kerja (spesialisasi), digantinya manusia dengan mesin, melakukan sub-kontrak beberapa aktifitas proses produksi kepada perusahaan lain, dan menjaga titik optimal operasi yang meminimalkan biaya (Toyne, 1974: 59-62).
2. Penghematan Eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi akibat aktifitas di luar lingkup perusahaan atau pabrik. Sebagaimana halnya suatu perusahaan dapat mencapai penghematan biaya secara internal dengan memperluas produksi atau meningkatkan efisiensi, suatu atau beberapa industri dapat meraih penghematan eksternal dengan beraglomerasi secara spasial. Penghematan biaya terjadi berkat adanya perusahaan-perusahaan

spasial. Penghematan biaya terjadi berkat adanya perusahaan-perusahaan dalam industri yang bersaing satu sama lain dalam memperoleh pasar atau konsumen. Penghematan juga terjadi karena adanya tenaga terampil dan bahan baku dalam daerah tersebut yang menopang jalannya usaha perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa daerah perkotaan menawarkan manfaat aglomerasi industri maupun penduduk yang diperkuat dengan adanya sarana dan prasarana, yang memungkinkan adanya penghematan biaya. Jaringan keterkaitan antara berbagai macam faktor ini akibat proses urbanisasi dan industrialisasi disebut sebagai aspek positif dari cumulative causation yang dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Proses Kausalitas Kumulatif (Cumulative Causation) Yang Positif Versi Myrdal (1957) dan Pred (1965)**

Sumber : Toyne (1974:68)

3. Penghematan akibat skala ekonomi muncul karena perusahaan menambah produksi dengan cara memperbesar pabrik (skala ekonomi). Penghematan biaya terjadi dengan meningkatkan skala produksi sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan. Ini berbeda dengan penghematan akibat cakupan yang terjadi karena sejumlah aktifitas atau sub-unit usaha secara internal maupun eksternal dapat dilakukan pada saat bersamaan sehingga menghemat biaya.

Baik penghematan eksternal maupun ekonomis dan cakupan secara khusus berkaitan dengan proses aglomerasi. Aglomerasi dalam hal ini dianggap sebagai wilayah perkotaan atau suatu kota. Penghematan aglomerasi merupakan fungsi dari sejumlah barang-barang konsumsi, variabilitas input antara, dan angkatan kerja (Fujita dan Mori, 1996:32).

#### 2.2.4.2 Konsep Perspektif Modern

Dalam konsep perspektif modern dikenal adanya eksternalitas dinamis yang menjelaskan secara simultan bagaimana kota-kota terbentuk dan mengapa mereka tumbuh. Berbeda dengan eksternalitas statis, eksternalitas dinamis versi Marshall-Arrow-Romer (MAR) menekankan pada pentingnya transfer pengetahuan (knowledge spillovers) antar perusahaan dalam industri, yang diperoleh lewat komunikasi yang terus berlangsung antar perusahaan lokal dalam industri yang sama (Henderson, Kuncoro, dan Turner, 1995;1968:32). Jacobs, di lain pihak percaya bahwa sumber transfer pengetahuan paling penting berasal dari luar industri inti (jacobs, 1969:33).

Henderson, et.al. (1995) mencoba menguji eksternalitas MAR dan Jacobs dengan mengamati pola pertumbuhan kesempatan kerja dalam 8 industri di 224 kota metropoliolitan AS selam 1970-1987. lima industri yang diamati adalah industri barang-barang modal tradisonal di mana kota cenderung berspesialisasi dalam produknya secara luas diperdagangkan antar kota, yaitu :

1. logam dasar
2. mesin
3. alat-alat elektronik

4. peralatan transpor
5. instrumen

Tiga industri lainnya mewakili industri berteknologi tinggi : komputer, komponen elektronik, dan peralatan medis. Dari sini mereka menemukan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di industri tradisional lebih tinggi di kota dengan konsentrasi kesempatan kerja di industri utamanya di masa lalu yang tinggi. Ini memperlihatkan bahwa eksternalitas ala Jacobs relatif kurang penting bagi industri yang tergolong “dewasa”. Sebaliknya, catatan keanekaragaman industri di masa lalu akan cenderung meningkatkan kemungkinan suatu kota menarik industri berteknologi tinggi. Jadi, eksternalitas Jacobs merupakan hal yang fundamental dalam upaya menarik industri baru, sedang eksternalitas MAR penting dalam upaya untuk mempertahankan industri yang telah ada.

Selain itu pertumbuhan kota-kota ternyata meliputi berbagai faktor yang lebih kompleks dari sekedar penghematan aglomerasi. Teori skala kota yang optimal (theoris of optimum city size) yang dikaji ulang oleh Fujita dan Thisse (1996:34), menggambarkan ekuilibrium konfigurasi spasial dari aktifitas ekonomi sebagai hasil daya tarik menarik antara kekuatan sentripetal dan sentrifugal. Kekuatan sentrifugal (centrifugal forces) adalah kekuatan dispersi, yang diperlihatkan oleh adanya kenaikan upah tenaga kerja yang terampil maupun kasar serta kenaikan gaji manajer yang mendorong perusahaan memilih lokasi di pusat kota. Pertumbuhan kota cenderung meningkatkan harga tanah secara riil karena jumlahnya tidak bertambah. Kota-kota utama juga menimbulkan eksternalitas negatif yang sering diasosiasikan dengan polusi lingkungan (Fujita dan Rivera-Batis, 1988:32). Inilah yang disebut kausalitas kumulatif yang negatif menurut versi Myrdal dan Pred seperti gambar di bawah ini.



**Gambar 2. Kausalitas Kumulatif Negatif Menurut Versi Myrdal dan Pred**  
 Sumber : Kuncoro (2000:33)

Gambar di atas menunjukkan bahwa begitu proses aglomerasi industri di perkotaan mencapai skala ekonomis yang maksimum, maka ekspansi setelah titik tersebut hanya akan menimbulkan dampak negatif di kota maupun daerah sekitarnya. Terjadinya peningkatan biaya jasa perbankan dan biaya overhead akan mengakibatkan desentralisasi dan relokasi aktifitas ekonomi ke daerah pinggiran kota atau kota satelit di seputar kota. Pendekatan sistem perkotaan menjelaskan kekuatan sentripetal aglomerasi sebagai penghematan eksternal murni, sedang kekuatan sentrifugal muncul dari adanya kebutuhan untuk nglaju (comute) ke daerah pusat kota dalam suatu wilayah kota.

### 2.2.5 Konsep Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis segenap unsur yang terkait di dalamnya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan aspek fungsional. Tipologi dari suatu wilayah adalah sebagai berikut :

1. Gambaran tunggal dari suatu wilayah, yaitu persamaan suatu wilayah ditentukan oleh satu fenomena. Misalnya; jenis tanah, agama, dan lainnya.
2. Gambaran majemuk dari suatu wilayah, yaitu suatu wilayah dengan fenomena yang kompleks dengan beberapa persamaan di dalamnya. Wilayah ini terdiri dari beberapa gambaran tunggal dari suatu wilayah tetapi terdapat fenomena yang kompleks (saling terkait) dalam satu kesatuan (Budhiharsosno, 1989: 12).

Wilayah dapat berbentuk formal atau fungsional berdasarkan kriteria tunggal atau jamak. Akan tetapi wilayah formal yang didefinisikan berdasarkan kriteria sosio ekonomi juga sangat bermanfaat walaupun wilayah formal fisik, atau wilayah ilmiah semakin kurang penting (Rudi wibowo dan Sutrisno, 2002: 42). Wilayah formal, fungsional, ataupun kombinasi keduanya dapat memberikan suatu kerangka yang bermanfaat bagi klasifikasi regional tipe ketiga, yaitu wilayah perencanaan (planning region) atau "programming region" sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi keputusan-keputusan ekonomi. Beberapa pakar memberikan landasan bahwa perencanaan yaitu :

1. haruslah cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi berskala ekonomi;
2. harus mampu mensuplai industrinya dengan tenaga kerja yang diperlukan;
3. harus mempunyai suatu struktur ekonomi yang homogen;
4. mempunya sekurang-kurangnya satu titik tumbuh (growth point);
5. dan menggunakan suatu cara pendekatan dan mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Ini menunjukkan bahwa wilayah perencanaan adalah wilayah geografik yang cocok untuk perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan guna memecahkan persoalan regional. Dengan dibatasi oleh kriteria-kriteria

tertentu yang terbagi secara interval, wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis antara lain (Budhiharsono, 1989; 32) :

#### 1. Wilayah Homogen

Adalah suatu wilayah dipandang dari suatu aspek yang mempunyai sifat dan ciri relatif sama. Misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi , pola konsumen homogen, dan pendapatan perkapita), geografi, agama, suku, dan sebagainya. Contohnya Jalur Pantura (Jatiluhur Pantai Utara, Jawa Barat).

#### 2. Wilayah Nodal

Merupakan wilayah yang secara fungsional memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah belakangnya (hinterland). Sukirno (1991 dalam Atik, 2003:15) menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal yang paling ideal untuk digunakan analisis mengenai ekonomi ruang adalah suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Contohnya wilayah Jakarta Barat dengan wilayah Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi).

#### 3. Wilayah Administratif

Ialah suatu wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik seperti : propinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

#### 4. Wilayah Perencanaan

Boudville (dalam Glasson, 1991:152) mendefinisikan wilayah perencanaan (planning region) sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Klassen (dalam Glasson, 1991:155) percaya bahwa wilayah perencanaan antara lain :

1. harus cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi;
2. harus mampu menyulap industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang diperlukan;

3. harus mempunyai struktur ekonomi yang homogen;
4. harus mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth pole);
5. harus menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan;
6. masyarakat dalam wilayah perencanaan mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

### 2.2.6 Teori Komunikasi dalam Perkembangan Kota

Pengangkutan dan komunikasi adalah media pokok dalam berinteraksi. Keuntungan utama dari aglomerasi kota pada umumnya adalah keuntungan yang diperoleh apabila orang hidup dekat dengan pusat-pusat pertukaran informasi dan dekat dengan tempat dimana transaksi-transaksi dengan mudah dapat dilakukan. R. I. Meir tetap berpendapat bahwa sistem komunikasi adalah dasar yang masuk akal untuk menyusun teori pertumbuhan kota.

beberapa ahli memandang kota terutama sebagai lokasi industri dan besarnya kota adalah variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan kota. Industrialisasi kota menjadi penting karena faktor ekonomi, industri menuntut banyak tenaga kerja dengan macam-macam ketrampilan. Kemudian faktor sekunder, yaitu memperluas fungsi dan besarnya komunitas kota karena konsentrasi penduduk menuntut jasa yang dibutuhkan. Proses ini dipercepat dengan adanya pengangkutan dan komunikasi yang baik. Apabila suatu kota adalah lokasi industri, besarnya yang optimal dan aktual menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan teknologi yang mempengaruhi industri dan tuntutan tenaga kerja yang cocok dengan industri tersebut. Perkembangan pendapat bahwa perubahan teknologi dalam industri menguntungkan daerah kota besar dan merugikan kota kecil adalah hipotesa "akibat besarnya kota"(urban size ratchet). Hal ini meliputi faktor seperti :

1. diversifikasi industri dan fungsi-fungsi ekonomi yang lain di kota besar yang jelas tidak mengalami kemunduran.

2. komunitas yang besar mungkin memperoleh bantuan keuangan yang lebih besar dari pemerintah pusat, karena penghuninya dapat lebih keras bersuara dalam politik.
3. dengan perluasan industri yang berorientasi pada konsumen, suatu pasar berpotensi besar di tengah penduduk kota pasti akan tumbuh.
4. dari segi penawaran, keberadaan para pembaharu-pembaharu di kota-kota besar menjadikan suatu kota sebagai sumber utama bagi perkembangan industri baru.

Konsep besarnya kota yang optimal mempunyai pengukuran kriteria untuk mendasari pola pertumbuhan kota yang optimal. Kriteria yang dipakai untuk menentukan konsep ini meliputi : faktor kesehatan, pertimbangan keamanan nasional, efisiensi yang berhubungan dengan kota, fasilitas-fasilitas pendidikan, taman-taman kota yang lebih baik, dan fasilitas-fasilitas rekreasi yang ditemui di kota-kota besar ataupun kecil.

### 2.2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Arsyad (1999:147-19) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perancis Perroux (1970) menjadi dasar strategi kebijakan industri daerah, Perroux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda, inti teori dari Perroux adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses perubahan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antara industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.

3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dengan industri unggulan/pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju/aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

ekonomi klasik neo klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985:275). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999: 141).

Menurut Ardani (1992:15), pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pertama *inward looking* teori, menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri misalnya *the export base theory* dan *the sector theory* dan yang kedua *outward oriented theory* yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah

ke daerah lain. Kedua pendekatan ini dalam penerapannya antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Arsyad (1999:147-148) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama.

### 2.2.8 Teori Tempat Sentral

Teori ini diperkenalkan oleh Christaller pada tahun 1930-an. Menurut Teori ini pertumbuhan kota tergantung pada spesialisasinya dalam fungsi pelayanan kota. Tingkat permintaan pelayanan kota di daerah pelayanannya atau jasa (service area) menentukan seberapa cepat tempat-tempat sentral berkembang. Teori ini juga merupakan teori umum dalam arti bahwa tidak hanya menjelaskan pertumbuhan kota secara terpisah tetapi juga urutan spasial dari pusat kota dalam ekonomi nasional negara.

Teori pertumbuhan kota masih merupakan hal yang belum dikembangkan dalam bidang ekonomi perkotaan dan ekonomi regional. Proses pertumbuhan kota yang kompleks, penuh dengan gejala sosial-kultural daripada gejala ekonomi sehingga perkembangannya tidak dapat dijelaskan semata-mata dalam kerangka ilmu ekonomi (James J Spillane, 1998; 152-153). Fungsi utama kota adalah sebagai pusat pelayanan untuk wilayah sekelilingnya (disebut daerah pelengkap atau complementary region) dengan menyediakan barang dan jasa sentral. Selain itu kota juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pusat perdagangan eceran dan grosir;
2. pusat usaha perbankan;
3. pusat organisasi perdagangan;
4. pusat penyedia jasa profesional;
5. pusat penyedia jasa administrasi;

6. pusat penyedia fasilitas pendidikan dan hiburan.

### 2.2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha, yang melaksanakan kegiatan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut (Widodo, 1990 : 23).

Secara berkala, PDRB dibagi dalam dua bentuk (Widodo, 1990 : 23) yaitu :

1. PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun baik pada saat menilai produksi dan biaya antara penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
2. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung frekuensi harga.

Perhitungan PDRB umumnya memiliki empat manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Mengetahui dan menelaah struktur dan susunan perekonomian suatu daerah artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah tersebut daerah pertanian, industri perdagangan, atau jasa;
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu artinya dalam perhitungan PDRB, angka yang dicatat merupakan angka-angka selama

jangka waktu tertentu misalnya : 1 tahun. Perbandingan ini dapat memberikan keterabgan terjadinya perubahan struktur atau tidak;

3. Membandingkan perekonomian antar daerah yang digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lainnya;
4. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah yaitu dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisi pada tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan demikian pendapatan perkapita pemerintah, dapat diperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

Menurut Arsyad (1998 : 18), pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu :

1. Metode langsung adalah metode perhitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah dengan data nasional sehingga hasil-hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut.
2. Metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara mengalokasi pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokasi.

### III. METODE PENELITIAN



#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan spasial propinsi Jawa Timur secara sistematis, faktual dan akurat dalam rangka prioritas regional dalam perencanaan pembangunan di propinsi Jawa Timur.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa letak propinsi Jawa Timur strategis dan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

##### 3.1.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berwenang atau instansi-instansi terkait dalam pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan. Data sekunder yang diperlukan dari instansi-instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Jawa Timur, dan instansi-instansi terkait lainnya.

Data sekunder yang digunakan antara lain PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, mulai dari tahun 1997–2001.

#### 3.2 Populasi

Populasi penelitian ini adalah sektor ekonomi di Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, populasi diambil dengan sengaja yaitu dengan mengambil waktu tahun 1997-2001 dengan alasan periode tersebut merupakan periode awal krisis.

### 3.3 Metode Analisis Data

#### 3.3.1 Indeks Entropi Theil

Konsep entropi dari suatu distribusi pada dasarnya mengukur kesenjangan ekonomi dan industri. Yang pertama indeks ini berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu. Sedang yang kedua penting untuk mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial sebagai contoh kesenjangan antar daerah.. Dalam konteks ini indeks entropi dapat dinyatakan dalam (Zaenal:A, 2003:18)

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log \left[ \frac{(y_j/Y)}{(x_j/X)} \right]$$

Dimana :

- I(y) = indeks entropi Theil
- y<sub>j</sub> = PDRB per kapita kabupaten j
- Y = rata-rata PDRB per kapita Jawa Timur
- x<sub>j</sub> = jumlah penduduk kabupaten j
- X = jumlah penduduk Jawa Timur

Jika I(y) > 1 maka tingkat kesenjangan tinggi;

Jika I(y) antara 0 - 1 maka tingkat kesenjangan rendah;

Jika I(y) < 0 maka tidak ada kesenjangan.

#### 3.3.2 Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Sjafrizal, (1997: 27-38) menyusun matrik sebagai berikut :

**Tabel 3. Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen**

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB per kapita (y)	$y_i < y$	$y_i > y$
	$r_i > r$	Daerah berkembang Cepat	Daerah cepat maju dan Cepat tumbuh
$r_i < r$		Daerah relatif Tertinggal	Daerah maju tapi Tertekan

Sumber : Prisma (1997:23)

Keterangan :  $r_i$  = laju pertumbuhan PDRB kabupaten i  
 $r$  = laju pertumbuhan total PDRB Jawa Timur  
 $y_i$  = PDRB perkapita kabupaten i  
 $y$  = PDRB perkapita Jawa Timur

### 3.3.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui lokasi-lokasi pusat pertumbuhan ekonomi maka digunakan formulasi (Hera, dkk, 1990 : 23) :

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

- $G_t$  = pertumbuhan ekonomi tahun ke t (persen);
- $PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t berdasar harga konstan (rupiah/ tahun);
- $PDRB_{t-1}$  = PDRB tahun ke t-1 berdasar harga konstan (rupiah/ tahun);
- t = tahun observasi.

Kriteria :

1.  $G_t$  rata-rata Kabupaten/ Kota i > mean berarti daerah tersebut merupakan lokasi pertumbuhan dalam periode tahun 1997-2001.

2. Gt rata-rata Kabupaten/ Kota  $i < \text{mean}$  berarti daerah tersebut bukan termasuk lokasi pertumbuhan dalam periode tahun 1997-2001

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Definisi variabel operasional adalah suatu definisi variabel yang akan digunakan dalam operasional penelitian. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran maka diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai lapangan usaha yang melakukan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperlihatkan pemilikan atas dasar faktor produksi dan dinyatakan dalam rupiah.
2. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur yang telah registrtrasi menurut sensus penduduk dalam satuan jiwa.
3. laju pertumbuhan adalah suatu pertumbuhan tiap tahun yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang terjadi pada daerah dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN



### 4.1 Gambaran Umum Obyek Yang Diteliti

#### 4.1.1 Keadaan Geografis

Propinsi Jawa Timur merupakan satu propinsi yang terletak di pulau Jawa selain propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi ini terletak pada 111,0' hingga 114,4' bujur timur dan 7,2' hingga 8,48' lintang selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya propinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan propinsi Bali. Sedangkan di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan propinsi Jawa Tengah.

Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari luas propinsi Jawa Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10%. Luas total propinsi Jawa Timur mencapai 46.428,57 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 8 Kota.

#### 4.1.2 Keadaan Penduduk

##### 4.1.2.1 Penduduk

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2001 jumlah penduduk propinsi Jawa Timur di tahun 2001 adalah 34.285.524 jiwa. Pertumbuhan penduduk Jawa Timur dalam kurun waktu 1996 – 2001 adalah 0,7% per tahun. Diantara 37 Kabupaten/ Kota, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang paling besar yaitu 2.463.716 jiwa yang diikuti oleh Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Sex-ratio pada tahun 2001 menunjukkan angka sebesar 96,28 yang berarti penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, dan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun pada 2001 adalah 712 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup> dengan jumlah WNA 0,07% dari jumlah penduduk yang sebagian besar menetap di Surabaya.

#### 4.1.2.2 Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja pada tahun 2000 sebanyak 317 274 orang, naik menjadi 320 269 pada tahun 2001. Sedangkan lowongan yang tersedia hanya 88 329 orang, dengan demikian masih terjadi kesenjangan antara-jumlah pencari kerja dengan lowongan yang ada dengan rasio mencapai 1 : 3,63 artinya setiap 1 lowongan pekerjaan diperebutkan 3 orang pencari kerja.

Sedangkan warga negara asing yang memegang ijin bekerja di Indonesia khususnya Jawa Timur dari tahun ke tahun terbanyak berasal dari negara-negara Asia selain China, India, dan Jepang. Rata-rata sektor yang menjadi tempat bekerja adalah sektor industri pengolahan, perdagangan dan rumah makan, jasa kemasyarakatan, konstruksi dan lain-lain.

#### 4.1.3 Kondisi industri Pengolahan

Data pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2001 profil industri pengolahan cenderung masih didominasi industri kecil. Akan tetapi nilai investasi dan produksi lebih banyak terserap pada industri yang berskala menengah-besar. Profil industri di Jawa Timur memperlihatkan tingkat pertumbuhan jumlah perusahaan industri pengolahan dan tenaga kerja meningkat sebesar 3,9 persen dan 4,4 persen. Peningkatan tersebut berdampak pada meningkatnya nilai investasi industri pengolahan tahun 2001 sebesar 2,7 persen sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi naiknya nilai produksi sekitar 4,35 persen.

**Tabel 4. Keadaan Industri Menurut Kelompok Industri**

No	Kelompok Industri	Jumlah/ Total			
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Nilai Investasi
1	ILMEA	2 848	186 537	4 664	3 619
2	IKAHH	11 123	709 490	4 109	7 011
3	IKDK	609 392	1 338 968	1 687	575
Jumlah		623 392	2 234 995	10 460	11 205

*Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, 2001*

Nilai out put perusahaan industri pengolahan besar dan sedang mengalami peningkatan sebesar 72,28 persen samapai pada tahun 2001. Selain itu dalam publikasi nilai tambah bruto (NTB) sektor industri pengolahan menunjukkan sumbangan NTB terbesar dihasilkan oleh kelompok industri tekstil yaitu lebi dari Rp. 47 triliun dan sumbangan terkecil dari kelompok industri daur ulang sebesar Rp. 7 milyar. Sementara persentase biaya input terbesar dari kelompok industri makanan dan minuman (15), yaitu sebesar 22,17 persen.

**Tabel 5. Profil Industri di Jawa Timur 2000-2001**

No	Uraian		2000	2001
		Jumlah Usaha	Unit	599 994
1	Jumlah Tenaga Kerja		2 141 870	2 234 995
2	Jumlah Produksi	Nilai	23 494	10 460
3	Jumlah Investasi	Nilai	18 573	11 205
4	Jumlah ekspor	Nilai	4 250 469	5 008 341

*Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, 2001*

#### 4.1.4 Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Jawa Timur menyajikan struktur perekonomian melalui tiga sektor utama yaitu pertanian, industri, dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Sampai saat ini sebagian besar Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur masih menggantungkan sektor pertanian dalam penciptaan PDRB. Ini menunjukkan wilayah Jawa Timur merupakan wilayah agraris, sehingga

perekonomiannya sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 1998 peran sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 21,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2001 meningkat sedikit menjadi 21,66 persen. Kenaikan peran sebesar 0,42 persen ini bukan berarti terjadi pergeseran struktur ekonomi di Jawa Timur, tetapi lebih diakibatkan oleh melambatnya sektor produksi lainnya terutama sektor industri yang sejak terhantam krisis tahun 1998 yang lalu pertumbuhannya semakin lambat.

**Tabel 6. Banyaknya Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Menurut Peranan Sektor Pertaniannya Tahun 2001**

Peranan	Kabupaten/ Kota	Jumlah
$\leq 9,99$	Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kab. Sidoarjo	9
10,00 – 19,99	Kab. Gresik	1
20,00 – 29,99	Kab. Tuban, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Tulungagung	4
30,00 – 39,00	Kab. Nganjuk, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang, Kab. Kediri	4
$\geq 40,00$	Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Blitar, Kab. Pacitan, Kab. Sampang, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Bangkalan.	19
	Jumlah	37

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/ Kota se Jawa Timur, 2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk daerah kota rata-rata merupakan kelas pertama dengan peran pertanian di bawah 10 persen, kecuali Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah sentra industri. Pada kelompok kelas selanjutnya tampak bahwa pertanian masih berpengaruh di atas 10 persen terutama pada

kelompok kelas lima yang didominasi oleh pertanian dengan tingkat pengaruh di atas 40 persen. Kondisi alam yang tersedia di masing-masing daerah yang mendukung terbentuknya sektor pertanian sebagai sektor utama.

Sedangkan untuk peranan industri yang relatif besar terdapat di Kota Kediri, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik. Daerah-daerah ini dikenal dengan peran dari industri rokok untuk Kota Kediri, sentra industri bagi Kab. Sidoarjo, dan industri Semen untuk Kab. Gresik.

#### **4.1.5 PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di wilayah/ daerah dan bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB perkapita di seluruh Kabupaten/ Kota se Jawa Timur pada tahun 1998 sampai 2001 rata-rata menunjukkan angka yang meningkat, bahkan untuk daerah-daerah tertentu menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Untuk melihat rata-rata PDRB perkapita yang diterima oleh penduduk tersebut digunakan perhitungan atas dasar harga berlaku. Untuk daerah yang rata-rata PDRB perkapitanya tinggi dan melebihi PDRB perkapita Jawa Timur adalah daerah kota dan daerah-daerah yang rata-rata peranan sektor industri dan perdagangannya tinggi seperti Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo.

#### **4.2 Analisis Data**

##### **4.2.1 Analisis Indeks Entropy Theil**

Analisis Indeks Entropy Theil ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada pada Propinsi Jawa Timur. Kesenjangan tersebut dihitung dari Kabupaten dan Kota yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropy Theil dapat diketahui bahwa Propinsi Jawa Timur memiliki tingkat kesenjangan yang cukup rendah. Selain itu nilai kesenjangan selalu mengalami fluktuasi dan tidak cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dihasilkan antara 0 – 1. Hasil analisis Indeks entropy

Theil Propinsi Jawa Timur mulai dari tahun 1997 – 2001 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7. Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Propinsi Jawa Timur Mulai Tahun 1997 - 2001**

No	Tahun	Indeks Entropy Theil
1	1997	0,601
2	1998	0,461
3	1999	0,463
4	2000	0,469
5	2001	0,489

Sumber : Biro Pusat Statistik Jawa Timur, data diolah, 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 1997 kesenjangan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,601. Sedangkan pada tahun 1998 kesenjangan memiliki nilai yang paling kecil yaitu sebesar 0,461. Hal ini dapat pula dikarenakan pada tahun 1998 Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya mengalami krisis terutama krisis ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan dalam pertumbuhan semakin mengecil.

#### 4.2.2 Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur.

**Tabel 8. Hasil Analisis Tipologi Klassen Propinsi Jawa Timur Tahun 1997 - 2001**

No	Nama kota
(1)	(2)
<b>1.</b>	<b>Kuadran I.</b>
	- Kota Kediri - Kabupaten Malang - Kabupaten Gresik - Kabupaten Jember
<b>2</b>	<b>Kuadran II</b>
	- Kabupaten Ponorogo

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kota Pasuruan</li><li>- Kabupaten Trenggalek</li><li>- Kabupaten Blitar</li><li>- Kabupaten Bondowoso</li><li>- Kota Mojokerto</li><li>- Kabupaten Lamongan</li><li>- Kabupaten Pacitan</li><li>- Kabupaten Situbondo</li><li>- Kabupaten Kediri</li><li>- Kabupaten Tulungagung</li><li>- Kabupaten Ngawi</li><li>- Kabupaten Sampang</li><li>- Kabupaten Magetan</li><li>- Kota Blitar</li></ul>
<b>3.</b>	<b>Kuadran III</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kota Madiun</li><li>- Kabupaten Madiun</li><li>- Kabupaten Jombang</li><li>- Kabupaten Probolinggo</li><li>- Kabupaten Bangkalan</li><li>- Kabupaten Bojonegoro</li><li>- Kabupaten Mojokerto</li><li>- kabupaten Ngawi</li><li>- Kabupaten Pamekasan</li><li>- Kabupaten Sumenep</li><li>- Kabupaten Lumajang</li><li>- Kabupaten Nganjuk</li><li>- Kota Probolinggo</li><li>- Kabupaten Tuban</li></ul>

4.	Kuadran IV
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Banyuwangi</li> <li>- Kota Malang</li> <li>- Kabupaten Sidoarjo</li> <li>- Kota Surabaya</li> <li>- Kabupaten Pasuruan</li> </ul>

*Sumber : Biro Pusat Statistik Jawa Timur, data diolah, 2003*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat empat Kabupaten/ kota termasuk daerah maju tapi tertekan pada kuadran IV yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Selain itu terdapat empat Kabupaten/ Kota yang termasuk dalam kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh pada kuadran I, antara lain :

1. Kabupaten Malang;
2. Kabupaten Jember;
3. Kabupaten Gresik;
4. Kota Kediri.

Sedangkan untuk daerah yang merupakan daerah relatif tertinggal pada kuadran III terdiri dari : Kabupaten lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep dst. Untuk Kabupaten Tuban merupakan satu-satunya daerah relatif tertinggal yang memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata akan tetapi PDRB-nya sama dengan rata-rata PDRB Jawa Timur. Kabupaten/ Kota yang lainnya termasuk kriteria daerah berkembang cepat pada kuadran II.

#### **4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi**

Alat analisa ini digunakan untuk mengetahui lokasi-lokasi pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur.

**Tabel 9. Rata - Rata Pertumbuhan Kabupaten / Kota Di Propinsi Jawa Timur Dari Tahun 1997 - 2001**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi
	Kabupaten	
1	Pacitan	0,38
2	Ponorogo	1,61
3	Trenggalek	1,02
4	Tulungagung	0,08
5	Blitar	0,89
6	Kediri	0,17
7	Malang	0,44
8	Lumajang	-0,73
9	Jember	-0,13
10	Banyuwangi	-0,66
11	Bondowoso	0,68
12	Situbondo	0,25
13	Probolinggo	-0,34
14	Pasuruan	-0,30
15	Sidoarjo	-1,32
16	Mojokerto	-0,49
17	Jombang	-0,30
18	Nganjuk	-0,83
19	Madiun	-0,33
20	Magetan	0,00
21	Ngawi	0,12
22	Bojonegoro	-0,48
23	Tuban	-0,63
24	Lamongan	0,46
25	Gresik	-0,04
26	Bangkalan	-0,45
27	Sampang	0,07
28	Pamekasan	-0,74
29	Sumenep	-0,80
	Kota	
30	Kota Kediri	0,57
31	Kota Blitar	0,02
32	Kota Malang	-2,00
33	Kota Probolinggo	-2,34
34	Kota Pasuruan	1,09
35	Kota Mojokerto	0,55
36	Kota Madiun	-0,22
37	Kota Surabaya	-1,74

Sumber : Biro Pusat Statistik Jawa Timur, data diolah, 2003

Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa lokasi-lokasi pertumbuhan terdapat pada daerah-daerah seperti Kota Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dengan angka pertumbuhan di atas 1. Hal ini disebabkan pada ketiga daerah tersebut industri menengah besar tidak menjadi dominan dalam menciptakan nilai tambah akan tetapi lebih pada sektor primer dan jasa. Sehingga beban industri akibat krisis yang cukup besar relatif tidak berpengaruh terhadap roda perekonomian.

Pada tahun tersebut krisis ekonomi terjadi pada puncaknya, sehingga banyak sektor ekonomi dan non ekonomi yang mengalami kemacetan/ limbung. Walaupun terdapat beberapa sektor seperti industri kecil dan menengah yang dapat bertahan dan bahkan berkembang, serta ekonomi makro mengalami depresi.

#### 4.3 Pembahasan

Propinsi Jawa Timur secara umum kurang berhasil dalam menerapkan kebijaksanaan tata ruang dalam perencanaan pembangunannya. Hal tersebut dijelaskan dalam hasil analisis yang telah di uraikan dalam sub bab analisis. Hasil tersebut menjelaskan adanya kesenjangan, meskipun relatif kecil tetapi menunjukkan tidak tepatnya sasaran pembangunan. Pemilihan alat analisa dalam penelitian ini pada kerangka sebagai berikut, bahwa dewasa ini belum ada alat analisa dalam telaah ilmu ekonomi regional yang memiliki validitas yang tinggi dalam menjelaskan sisi dimensi ruang dari suatu daerah (John glasson, 1991 : 123).

Berangkat dari pemikiran tersebut maka penelitian ini diarahkan pada dimensi ruang artinya menelaah dimensi ruang melalui pandangan mengenai kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, digunakan analisis Indeks Entropy yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Sedangkan untuk mengetahui pola, struktur dan lokasi-lokasi pertumbuhan maka digunakan alat analisis Tipologi Klassen dan Pertumbuhan Ekonomi.

Kesenjangan dalam suatu propinsi mengukur derajat perbedaan dalam pangsa kabupaten/ kota dalam propinsi. Indeks Entropy di Jawa Timur

menunjukkan konsentrasi spasial yang fluktuatif meskipun tidak begitu mencolok dalam lima tahun terakhir. Hal ini menyiratkan bahwa kesenjangan spasial di Propinsi Jawa Timur relatif rendah. Angka kesenjangan dari nilai Indeks Entropy tertinggi disumbang oleh Kota Kediri sebesar 0,488088, sedangkan Indeks Entropy sendiri nilainya sebesar 0,600654. ini menunjukkan PDRB perkapita Kota Kediri relatif tinggi daripada daerah lainnya yang berarti tingkat kesejahterannya juga cukup tinggi. Untuk penurunan angka Indeks Entropy disebabkan pada tahun 1998 Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya terkena dampak krisis ekonomi regional yang menyebabkan mayoritas sektor perekonomian terutama industri berskala besar mengalami kemacetan. Kemacetan ini mempengaruhi proses pembangunan yang sedang berjalan sehingga kesenjangan yang ada semakin menurun seiring dengan menurunnya tingkat kesejahteraan.

Kesenjangan yang ada dikarenakan lokasi-lokasi industri menengah besar terdapat pada daerah tertentu seperti Kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik yang ditegaskan dalam analisis Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi dimana rata-rata PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita Jawa Timur. Pola dan struktur pertumbuhan tiga diantara tujuh kabupaten tersebut termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Pada tahun 1998 pertumbuhan pada semua Kabupaten/ Kota cenderung negatif, yang dikarenakan depresi ekonomi secara makro. Tetapi pada tahun 1999-2001 pertumbuhan mulai ada yang ditunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Adapun Kabupaten Sumenep dan Kota Surabaya yang memiliki pertumbuhan negatif sebesar -4,01 dan -0,25 lebih dikarenakan potensi daerah yang dimiliki. Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah tertinggal tidak memiliki sumberdaya baik alam maupun manusia yang memadai sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk Kota Surabaya yang merupakan daerah industri, wajar apabila dalam jangka waktu 1-2 tahun mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini disebabkan industri menengah besar langsung terkena dampak krisis moneter sehingga dari segi finansial industri yang bersangkutan mengalami

pembengkakan hutang yang dinilai dengan mata uang luar negeri terutama dolar AS. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur antara tahun 1997 - 2001 dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini :



**Gambar 3. Peta Jawa Timur Menurut Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi**

- Keterangan :
-  : Daerah berkembang cepat
  -  : Daerah maju tapi tertekan
  -  : Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
  -  : Daerah relatif tertinggal

## V. KESIMPULAN DAN SARAN



### 5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis kesenjangan spasial propinsi Jawa Timur menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Dari nilai Indeks Entropy mulai dari tahun 1997-2001 yaitu 0,600654; 0,461; 0,463; 0,469; 0,489, dapat dilihat bahwa kesenjangan yang ada di Propinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir relatif rendah dan mengalami fluktuatif yang tidak begitu besar. Kesenjangan yang relatif kecil ini dikarenakan dampak krisis ekonomi yang dialami Indonesia secara keseluruhan dan Jawa Timur sebagai bagian wilayahnya sehingga tingkat kesenjangan semakin berkurang seiring dengan menurunnya tingkat pendapatan/ kesejahteraan masyarakat menengah atas pada khususnya. Industri berskala menengah besarpun mengalami kemacetan dengan meningkatnya nilai utang luar negeri dan harga bahan baku dari luar negeri. Sedangkan industri kecil dapat bertahan dan bahkan mulai berkembang, hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan antara industri menengah besar dengan industri kecil semakin menurun.
2. Pola dan struktur pertumbuhan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur rata-rata adalah daerah cepat berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi PDRB perkapitanya di bawah rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Dari hasil analisis dapat diketahui sebelas Kabupaten/ Kota merupakan daerah relatif tertinggal, satu Kabupaten memiliki tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita dengan rata-rata Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, empat Kabupaten/ Kota adalah daerah cepat tumbuh dan berkembang, dan lima Kabupaten/ Kota adalah daerah maju tapi tertekan yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi tetapi pendapatan PDRB perkapita di bawah rata-rata Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

3. Untuk pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi semua Kabupaten/ Kota di Jawa Timur bernilai negatif dan pada tahun selanjutnya hanya Kabupaten Sumenep yang pertumbuhan ekonominya bernilai negatif. Selain itu Kota Surabaya yang pertumbuhan ekonominya berlanjut negatif pada tahun 1999. Bila dilihat secara seksama, Kota Surabaya merupakan basis berbagai macam industri di Propinsi Jawa Timur sehingga wajar bila pertumbuhannya negatif karena di Surabaya industri yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan ekonominya mengalami kemacetan bahkan beberapa gulung tikar akibat dampak krisis ekonomi. Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep, faktor sumber daya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan yang negatif baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terbatas untuk mengembangkan potensi daerah.

## 5.2 Saran

1. Perlunya tenaga perencana berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk membantu pelaksanaan pembangunan secara lebih terarah dan efisien.
2. Pemerataan pembangunan propinsi Jawa timur melalui alokasi dana pembangunan yang proporsional agar antar daerah Kabupaten/ Kota tidak memiliki kesenjangan yang cukup besar dimana kesenjangan tidak dapat dihilangkan karena suatu bagian daripada pembangunan.
3. Pengembangan daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki.
4. Perlu adanya penelitian regional dari berbagai segi untuk menelaah masalah di Propinsi Jawa Timur kemudian dicari solusinya karena masalah ruang/ regional merupakan suatu masalah yang kompleks.

## DAFTAR PUSATAKA

- Arifin, Z. (2002), *Konsentrasi Spasial dan Dinamika Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur (Studi Kasus Industri Besar dan Sedang, 1994-1999)*, Tesis Program Studi Tidak Dipublikasikan PPS-UGM Yogyakarta.
- BPS Jatim dan BAPPEPROP Jatim, 2002, *PDRB menurut Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur 1998-2001*, Surabaya
- Glasson, J, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sihotang, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- IB, Wirawan, Sukidin, Basrowi, 2001, *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Jember University Press, Jember
- Jhinghan, ML, 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Paska Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Mudrajad Koncoro, 2002, *Analisis Spasial dan Regional "Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia"*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Richardson, W, Harry, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sihotang, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta
- Tim Penulis Modul Fisip UT, 1994, *Perencanaan Pembangunan*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta
- Wibowo, Rudi, dan Sutrisno, 2002, *Konsep dan Landasan Analisis Wilayah*, Jember, Faperta-Universitas Jember
- Zaenal, Arifin, 2003, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten Di Jawa Timur*, Tesis tidak dipublikasikan, Unmuh Malang
- ....., 2001, *Propenas 2000-2004 (UU No. 25 Th. 2000)*, Sinar Grafika, Jakarta
- ....., 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, *Prisma volume XV*, Jakarta

Lampiran 1 Jumlah Penduduk Per Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 1997- 2001

No	Nama Kabupaten/ Kota	1997	1998	1999	2000	2001
1	Pacitan	531991	534692	530326	541326	543252
2	Ponorogo	880116	884459	889417	894673	898158
3	Trenggalek	655590	683860	662868	667244	671404
4	Tulungagung	941803	947790	955451	964127	972187
5	Blitar	1088009	1090399	1092803	1096758	1101853
6	Kediri	1330106	1340299	1351247	1378216	1400292
7	Malang	2333015	2345567	2362546	2382258	2399904
8	Lumajang	931075	934478	941590	943800	948671
9	Jember	2078701	2083068	2106632	2105132	2120074
10	Banyuwangi	1452176	1451787	1454581	1470094	1475438
11	Bondowoso	661413	662726	663511	674725	673129
12	Situbondo	579628	580235	581080	600235	600208
13	Probolinggo	922680	934261	922582	922667	961190
14	Pasuruan	1183798	1197362	1208473	1222071	1225866
15	Sidoarjo	1164646	1192165	1232552	1266776	1293111
16	Mojokerto	859290	866684	851981	880855	887831
17	Jombang	1106441	1114150	1121721	1129014	1135285
18	Nganjuk	1000747	1004193	1008864	1013101	1016030
19	Madiun	650133	651049	654665	654665	654665
20	Magetan	674367	675376	677464	680402	683472
21	Ngawi	845703	848093	854073	858042	862533
22	Bojonegoro	1167628	1170917	1176016	1183660	1191394
23	Tuban	1000111	1006751	1015732	1021920	1027486
24	Lamongan	1185437	1188866	1193644	1200103	1210879
25	Gresik	919515	920478	942898	957048	963816
26	Bangkalan	732123	733778	749202	762046	773500
27	Sampang	707923	709495	710658	715233	721869
28	Pamekasan	664527	666675	671544	674133	683916
29	Sumenep	954215	956091	958358	966189	978763
30	Kota Kediri	235614	236614	236575	238536	238955
31	Kota Blitar	120671	121087	122117	123194	123778
32	Kota Malang	714329	710576	719744	730768	743508
33	Kota Probolinggo	180079	180659	181093	181431	181999
34	Kota Pasuruan	155745	156561	157739	158864	159796
35	Kota Mojokerto	106135	107123	108027	108045	108025
36	Kota Madiun	185558	186331	185643	188344	189571
37	Kota Surabaya	2356486	2373082	2401104	2444976	2463716

Lampiran 2 Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 1997-2001

Kabupaten	1997	1998	1999	2000	2001	Rata - rata Pertumbuhan
KAB. PACITAN	2,15	-7,54	1,49	3,90	1,90	0,38
KAB. PONOROGO	3,07	-7,71	3,00	7,79	1,90	1,61
KAB. TRENGGALEK	3,24	-8,04	2,43	4,35	3,13	1,02
KAB. TULUNGAGUNG	5,03	-15,72	1,57	6,99	2,53	0,08
KAB. BLITAR	1,84	-9,88	3,31	6,69	2,47	0,89
KAB. KEDIRI	3,30	-13,81	3,31	4,92	3,11	0,17
KAB. MALANG	3,07	-11,21	2,07	3,60	4,64	0,44
KAB. LUMAJANG	2,46	-14,56	1,32	2,66	4,47	-0,73
KAB. JEMBER	1,30	-11,38	1,75	3,71	3,98	-0,13
KAB. BANYUAWANGI	2,38	-12,83	0,25	3,46	3,46	-0,66
KAB. BONDOWOSO	2,91	-8,54	1,27	2,35	5,42	0,68
KAB. SITUBONDO	3,39	-10,24	1,29	2,26	4,53	0,25
KAB. PROBOLINGGO	6,15	-12,70	0,32	1,49	3,04	-0,34
KAB. PASURUAN	3,84	-13,64	1,29	3,27	3,71	-0,30
KAB. SIDOARJO	5,67	-20,46	1,06	3,92	3,20	-1,32
KAB. MOJOKERTO	2,69	-14,80	3,58	2,25	3,84	-0,49
KAB. JOMBANG	3,42	-12,81	1,57	2,48	3,86	-0,30
KAB. NGANJUK	3,20	-13,26	1,05	2,40	2,47	-0,83
KAB. MADIUN	4,53	-12,99	0,65	1,43	4,73	-0,33
KAB. MAGETAN	2,19	-11,78	1,36	3,42	4,82	0,00
KAB. NGAWI	2,53	-10,06	1,54	2,40	4,19	0,12
KAB. BOJONEGORO	3,33	-11,73	1,32	1,95	2,73	-0,48
KAB. TUBAN	0,83	-23,38	11,48	2,51	5,41	-0,63
KAB. LAMONGAN	2,90	-9,33	2,06	2,86	3,83	0,46
KAB. GRESIK	4,87	-18,88	3,71	5,92	4,19	-0,04
KAB. BANGKALAN	2,54	-8,75	0,07	1,89	2,02	-0,45
KAB. SAMPANG	1,33	-8,07	1,70	1,48	3,90	0,07
KAB. PAMEKASAN	3,47	-11,26	0,08	2,26	1,75	-0,74
KAB. SUMENEP	9,78	-4,39	-4,01	3,58	-8,94	-0,80
KOTA KEDIRI	10,36	-9,74	0,09	0,63	1,51	0,57
KOTA BLITAR	5,96	-15,90	1,42	3,70	4,92	0,02
KOTA MALANG	6,46	-21,79	0,04	2,13	3,18	-2,00
KOTA PROBOLINGGO	4,31	-18,57	0,19	1,72	0,66	-2,34
KOTA PASURUAN	5,82	-11,63	1,82	4,74	4,72	1,09
KOTA MOJOKERTO	3,54	-12,35	1,77	3,67	6,11	0,55
KOTA MADIUN	8,24	-18,22	0,73	3,50	4,65	-0,22
KOTA SURABAYA	6,41	-22,38	-0,25	3,42	4,08	-1,74

Lampiran 3 PDRB Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 1997-2001

Nama Kabupaten/ Kota	1997	1998	1999	2000	2001
KAB. PACITAN	403854,17	373386,45	378968,43	393740	401206,9
KAB. PONOROGO	674319,8	622343,44	641025,71	690941,68	704047,81
KAB. TRENGGALEK	415886,84	382434,78	391734,28	408777,76	421554,81
KAB. TULUNGAGUNG	1341472,73	1130629,43	1148389,65	1228687,73	1259833
KAB. BLITAR	811643,3	731426,93	755651,02	806239,5	826184,16
KAB. KEDIRI	1519020,64	1309233,03	1352581,7	1419133,11	1463235,14
KAB. MALANG	2554003,75	2267707,37	2314757,62	2398071,32	2509447,06
KAB. LUMAJANG	1035409,73	884621,59	896298,84	920175,54	961327,48
KAB. JEMBER	2008303,8	1779848,01	1811053,1	1878241,06	1953075,87
KAB. BANYUAWANGI	1923242,34	1676582,84	1680755,81	1738888,34	1799058,42
KAB. BONDOWOSO	629089,19	575351,73	582681,2	596379,65	628675,46
KAB. SITUBONDO	767884,69	689230,42	698122,81	713913,54	746271,15
KAB. PROBOLINGGO	1355409,23	1183332,32	1187118,72	1204777,75	1241462,35
KAB. PASURUAN	2813698,03	2429907,37	2461313,9	2541749,58	2636128,77
KAB. SIDOARJO	5698350,67	4532682,05	4580671,98	4760372,12	4912736,42
KAB. MOJOKERTO	1222428,25	1041508,54	1078829,82	1103102,03	1145469,56
KAB. JOMBANG	1079628,65	941323,53	956067,44	979781,85	1017594,57
KAB. NGANJUK	860031	746023,21	753867,92	771945,37	790988,3
KAB. MADIUN	574133,98	499565,27	502823,42	510020,34	534135,58
KAB. MAGETAN	635805,25	560907,08	568518,05	587958,68	616276,86
KAB. NGAWI	711359,53	639807,35	649685,01	665272,11	693155,49
KAB. BOJONEGORO	963502,65	850472,27	861736,46	878579,5	902571,63
KAB. TUBAN	1801993,28	1380612,44	1539101,64	1577787,79	1663072,2
KAB. LAMONGAN	978060,37	886854,94	905166,07	931021,45	966703,35
KAB. GRESIK	3705592,31	3005954,69	3117478,29	3302182,77	3440702,78
KAB. BANGKALAN	689487,68	629165,18	629615,92	641523,26	654488,99
KAB. SAMPANG	672703,11	618389,92	628929,32	638267,75	663177,81
KAB. PAMEKASAN	542935,57	481796,08	482180,94	493091,94	501740,22
KAB. SUMENEP	988252,12	944835,53	906991,12	939464,63	855436,54
KOTA KEDIRI	5377234,01	4853529,15	4857796,42	4888528,87	4962369,56
KOTA BLITAR	284910,98	239616,48	243020,16	252008,68	264400,58
KOTA MALANG	2653064,65	2074986,17	2075765,61	2120077,32	2187496,28
KOTA PROBOLINGGO	632959,65	515409,22	516376,87	525279,22	528766,04
KOTA PASURUAN	350721,76	309940,36	315578,39	330537,51	346134,88
KOTA MOJOKERTO	322713,22	282862,34	287862,44	298440,72	316685,28
KOTA MADIUN	481442,06	393742,29	396606,55	410484,34	429573,18
KOTA SURABAYA	15373261,88	11933442,11	11903847,82	12311076	12813073,18

Lampiran 4 Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1997

Kabupaten	y <sub>j</sub>	x <sub>j</sub>	y <sub>j</sub> /Y	x <sub>j</sub> /X	log (y <sub>j</sub> /Y)/(x <sub>j</sub> /X)	I(y)
KAB. PACITAN	759.137	531.991	0,009979648	0,015996110	-0,204899144	0,600653768
KAB. PONOROGO	766.172	880.116	0,010072121	0,026463666	-0,419529066	
KAB. TRENGGALEK	634.370	655.590	0,008339457	0,019712532	-0,373604608	
KAB. TULUNGAGUNG	1.424.367	941.803	0,018724780	0,028318494	-0,179653436	
KAB. BLITAR	745.990	1.088.009	0,009806808	0,032714672	-0,523214913	
KAB. KEDIRI	1.142.030	1.330.106	0,015013169	0,039994138	-0,425523975	
KAB. MALANG	1.094.722	2.333.015	0,014391264	0,070149991	-0,687928677	
KAB. LUMAJANG	1.112.058	931.075	0,014619163	0,027995921	-0,282172235	
KAB. JEMBER	966.134	2.078.701	0,012700837	0,062503180	-0,692069785	
KAB. BANYUAWANGI	1.324.387	1.452.176	0,017410438	0,043664585	-0,399319644	
KAB. BONDOWOSO	951.129	661.413	0,012503582	0,019887620	-0,201548376	
KAB. SITUBONDO	1.324.789	579.628	0,017415726	0,017428477	-0,000317850	
KAB. PROBOLINGGO	1.468.992	922.680	0,019311423	0,027743496	-0,157346920	
KAB. PASURUAN	2.376.840	1.183.798	0,031246029	0,035594893	-0,056592863	
KAB. SIDOARJO	4.892.775	1.164.646	0,064320613	0,035019023	0,264046148	
KAB. MOJOKERTO	1.422.603	859.290	0,018701591	0,025837462	-0,140371283	
KAB. JOMBANG	975.767	1.106.441	0,012827472	0,033268893	-0,413897265	
KAB. NGANJUK	859.389	1.000.747	0,011297562	0,030090845	-0,425449633	
KAB. MADIUN	883.102	650.133	0,011609299	0,019548449	-0,226306316	
KAB. MAGETAN	942.818	674.367	0,012394321	0,020277126	-0,213783656	
KAB. NGAWI	841.146	845.703	0,011057736	0,025428922	-0,361661734	
KAB. BOJONEGORO	825.179	1.167.628	0,010847842	0,035108687	-0,510071234	
KAB. TUBAN	1.801.793	1.000.111	0,023686446	0,030071722	-0,103658386	
KAB. LAMONGAN	825.063	1.185.437	0,010846313	0,035644175	-0,516706440	
KAB. GRESIK	4.029.942	919.515	0,052977781	0,027648330	0,282424855	
KAB. BANGKALAN	941.765	732.123	0,012380478	0,022013755	-0,249956736	
KAB. SAMPANG	950.249	707.923	0,012492011	0,021286101	-0,231463755	
KAB. PAMEKASAN	817.026	664.527	0,010740651	0,019981253	-0,269592113	
KAB. SUMENEP	1.035.670	954.215	0,013614963	0,028691703	-0,323739869	
KOTA KEDIRI	22.822.218	235.614	0,300021782	0,007084532	1,626841607	
KOTA BLITAR	2.361.056	120.671	0,031038535	0,003628382	0,932188218	
KOTA MALANG	3.714.065	714.329	0,048825252	0,021478719	0,356636124	
KOTA PROBOLINGGO	3.514.900	180.079	0,046207013	0,005414685	0,931134739	
KOTA PASURUAN	2.251.897	155.745	0,029603533	0,004683000	0,800819340	
KOTA MOJOKERTO	3.040.592	106.135	0,039971742	0,003191308	1,097784363	
KOTA MADIUN	2.594.564	185.558	0,034108238	0,005579429	0,786259518	
KOTA SURABAYA	6.523.808	2.356.486	0,085762237	0,070855726	0,082921152	

Lampiran 5 Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1998

Kabupaten	yj	xj	yj/Y	xj/X	log (yj/Y)/(xj/X)	I(y)
KAB. PACITAN	534.692	534692	0,0091802	0,0159859	-0,24088662	0,461612
KAB. PONOROGO	884.459	884459	0,0092501	0,0264430	-0,45616309	
KAB. TRENGGALEK	683.860	683860	0,0073517	0,0204456	-0,44421482	
KAB. TULUNGAGUNG	947.790	947790	0,0156821	0,0283364	-0,25694176	
KAB. BLITAR	1.090.399	1090399	0,0088182	0,0326000	-0,56783774	
KAB. KEDIRI	1.340.299	1340299	0,0128413	0,0400714	-0,49422423	
KAB. MALANG	2.345.567	2345567	0,0127097	0,0701262	-0,74174647	
KAB. LUMAJANG	934.478	934478	0,0124447	0,0279384	-0,35121843	
KAB. JEMBER	2.083.068	2083068	0,0112324	0,0622782	-0,74386178	
KAB. BANYUWANGI	1.451.787	1451787	0,0151816	0,0434046	-0,45621859	
KAB. BONDOWOSO	662.726	662726	0,0114129	0,0198138	-0,23957239	
KAB. SITUBONDO	580.235	580235	0,0156155	0,0173475	-0,04568121	
KAB. PROBOLINGGO	934.261	934261	0,0166507	0,0279319	-0,22466751	
KAB. PASURUAN	1.197.362	1197362	0,0266784	0,0357980	-0,12769902	
KAB. SIDOARJO	1.192.165	1192165	0,0499820	0,0356426	0,14684472	
KAB. MOJOKERTO	866.684	866684	0,0157978	0,0259116	-0,21489652	
KAB. JOMBANG	1.114.150	1114150	0,0111068	0,0333101	-0,47698621	
KAB. NGANJUK	1.004.193	1004193	0,0097663	0,0300227	-0,48771984	
KAB. MADIUN	651.049	651049	0,0100873	0,0194646	-0,28547291	
KAB. MAGETAN	675.376	675376	0,0109179	0,0201920	-0,26703812	
KAB. NGAWI	848.093	848093	0,0099175	0,0253557	-0,40767553	
KAB. BOJONEGORO	1.170.917	1170917	0,0095484	0,0350073	-0,56422986	
KAB. TUBAN	1.006.751	1006751	0,0180279	0,0300992	-0,22261016	
KAB. LAMONGAN	1.188.866	1188866	0,0098065	0,0355439	-0,55925102	
KAB. GRESIK	920.478	920478	0,0429303	0,0275199	0,19311780	
KAB. BANGKALAN	733.778	733778	0,0112718	0,0219380	-0,28920249	
KAB. SAMPANG	709.495	709495	0,0114580	0,0212120	-0,26747408	
KAB. PAMEKASAN	666.675	666675	0,0095004	0,0199318	-0,32180288	
KAB. SUMENEP	956.091	956091	0,0129913	0,0285846	-0,34248004	
KOTA KEDIRI	236.614	236614	0,2696573	0,0070741	1,58113897	
KOTA BLITAR	121.087	121087	0,0260144	0,0036202	0,85648385	
KOTA MALANG	710.576	710576	0,0383884	0,0212443	0,25695634	
KOTA PROBOLINGGO	180.659	180659	0,0375049	0,0054012	0,84159518	
KOTA PASURUAN	156.561	156561	0,0260249	0,0046808	0,74507316	
KOTA MOJOKERTO	107.123	107123	0,0347126	0,0032027	1,03497188	
KOTA MADIUN	186.331	186331	0,0277793	0,0055708	0,69780403	
KOTA SURABAYA	2.373.082	2373082	0,0661071	0,0709489	-0,030697559	

Lampiran 6 Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 1999

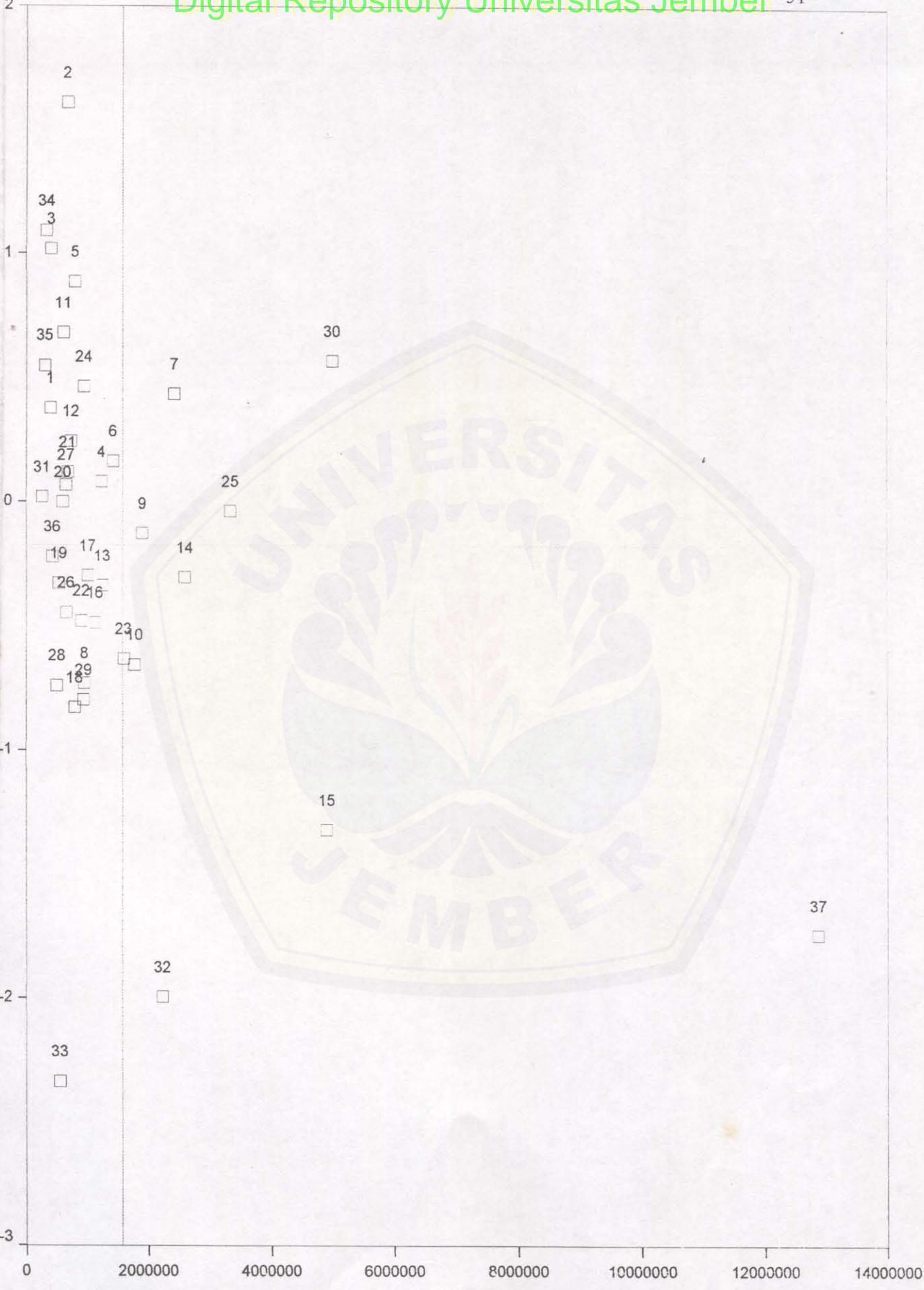
Kabupaten	y <sub>j</sub>	x <sub>j</sub>	y <sub>j</sub> /Y	x <sub>j</sub> /X	log (y <sub>j</sub> /Y)/(x <sub>j</sub> /X)	I(y)
KAB. PACITAN	714.595	530326	0,0093941	0,0157579	-0,22464445	0,463305
KAB. PONOROGO	720.726	889417	0,0094747	0,0264279	-0,44549705	
KAB. TRENGGALEK	590.969	662868	0,0077689	0,0196963	-0,40402418	
KAB. TULUNGAGUNG	1.201.935	955451	0,0158007	0,0283900	-0,25448921	
KAB. BLITAR	691.480	1092803	0,0090902	0,0324712	-0,55292413	
KAB. KEDIRI	1.000.988	1351247	0,0131590	0,0401505	-0,48446762	
KAB. MALANG	979.773	2362546	0,0128801	0,0702000	-0,73641667	
KAB. LUMAJANG	951.899	941590	0,0125137	0,0279781	-0,34943249	
KAB. JEMBER	859.691	2106632	0,0113015	0,0625958	-0,74340781	
KAB. BANYUAWANGI	1.155.491	1454581	0,0151901	0,0432210	-0,45413284	
KAB. BONDOWOSO	878.179	663511	0,0115446	0,0197154	-0,23242689	
KAB. SITUBONDO	1.201.423	581080	0,0157940	0,0172660	-0,03870167	
KAB. PROBOLINGGO	1.286.735	922582	0,0169155	0,0274133	-0,20967745	
KAB. PASURUAN	2.036.714	1208473	0,0267747	0,0359082	-0,12746854	
KAB. SIDOARJO	3.716.413	1232552	0,0488561	0,0366237	0,12515705	
KAB. MOJOKERTO	1.266.260	851981	0,0166463	0,0253155	-0,18206852	
KAB. JOMBANG	852.322	1121721	0,0112047	0,0333305	-0,47344282	
KAB. NGANJUK	747.244	1008864	0,0098233	0,0299771	-0,48453163	
KAB. MADIUN	768.062	654665	0,0100970	0,0194525	-0,28478439	
KAB. MAGETAN	839.186	677464	0,0110320	0,0201300	-0,26118983	
KAB. NGAWI	760.690	854073	0,0100001	0,0253777	-0,40444878	
KAB. BOJONEGORO	732.759	1176016	0,0096329	0,0349438	-0,55961364	
KAB. TUBAN	1.515.264	1015732	0,0199197	0,0301811	-0,18045261	
KAB. LAMONGAN	758.322	1193644	0,0099689	0,0354676	-0,55118302	
KAB. GRESIK	3.306.273	942898	0,0434644	0,0280170	0,19071236	
KAB. BANGKALAN	840.382	749202	0,0110477	0,0222616	-0,30428380	
KAB. SAMPANG	884.996	710658	0,0116342	0,0211163	-0,25888110	
KAB. PAMEKASAN	718.018	671544	0,0094391	0,0199541	-0,32510055	
KAB. SUMENEP	946.401	958358	0,0124414	0,0284764	-0,35961415	
KOTA KEDIRI	20.533.854	236575	0,2699389	0,0070295	1,58433997	
KOTA BLITAR	1.990.060	122117	0,0261614	0,0036285	0,85792840	
KOTA MALANG	2.884.033	719744	0,0379136	0,0213863	0,24866056	
KOTA PROBOLINGGO	2.851.446	181093	0,0374852	0,0053809	0,84300181	
KOTA PASURUAN	2.000.636	157739	0,0263004	0,0046870	0,74906744	
KOTA MOJOKERTO	2.664.727	108027	0,0350306	0,0032099	1,03795873	
KOTA MADIUN	2.136.394	185643	0,0280851	0,0055161	0,70684108	
KOTA SURABAYA	4.957.656	2401104	0,0651735	0,0713457	-0,03929622	

Lampiran 7 Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 2000

Kabupaten	y <sub>j</sub>	x <sub>j</sub>	y <sub>j</sub> /Y	x <sub>j</sub> /X	log (y <sub>j</sub> /Y)/(x <sub>j</sub> /X)	I(y)
KAB. PACITAN	727.362	541326	0,0095619	0,0159210	-0,22142581	0,469875
KAB. PONOROGO	772.284	894673	0,0101525	0,0263134	-0,41360484	
KAB. TRENGGALEK	612.636	667244	0,0080537	0,0196244	-0,38679967	
KAB. TULUNGAG'JNG	1.274.404	964127	0,0167534	0,0283561	-0,22854454	
KAB. BLITAR	735.112	1096758	0,0096638	0,0322570	-0,52347512	
KAB. KEDIRI	1.029.688	1378216	0,0135363	0,0405350	-0,47632901	
KAB. MALANG	1.006.638	2382258	0,0132333	0,0700650	-0,72383306	
KAB. LUMAJANG	974.969	943800	0,0128170	0,0277583	-0,33560683	
KAB. JEMBER	892.220	2105132	0,0117292	0,0619144	-0,72252491	
KAB. BANYUAWANGI	1.182.842	1470094	0,0155497	0,0432372	-0,44413609	
KAB. BONDOWOSO	883.886	674725	0,0116196	0,0198445	-0,23244836	
KAB. SITUBONDO	1.189.390	600235	0,0156358	0,0176536	-0,05271458	
KAB. PROBOLINGGO	1.305.756	922667	0,0171655	0,0271367	-0,19890061	
KAB. PASURUAN	2.079.871	1222071	0,0273421	0,0359426	-0,11877769	
KAB. SIDOARJO	3.757.864	1266776	0,0494010	0,0372574	0,12252368	
KAB. MOJOKERTO	1.252.308	880855	0,0164629	0,0259070	-0,19691073	
KAB. JOMBANG	867.821	1129014	0,0114084	0,0332056	-0,46398684	
KAB. NGANJUK	761.963	1013101	0,0100168	0,0297965	-0,47343649	
KAB. MADIUN	779.055	654665	0,0102415	0,0192545	-0,27416832	
KAB. MAGETAN	864.134	680402	0,0113599	0,0200114	-0,24590193	
KAB. NGAWI	775.337	858042	0,0101926	0,0252360	-0,39373535	
KAB. BOJONEGORO	742.257	1183660	0,0097577	0,0348128	-0,55239045	
KAB. TUBAN	1.543.945	1021920	0,0202968	0,0300559	-0,17050278	
KAB. LAMONGAN	775.785	1200103	0,0101985	0,0352965	-0,53919493	
KAB. GRESIK	3.450.384	957048	0,0453589	0,0281479	0,20721610	
KAB. BANGKALAN	841.843	762046	0,0110669	0,0224127	-0,30646754	
KAB. SAMPANG	892.391	715233	0,0117314	0,0210358	-0,25360976	
KAB. PAMEKASAN	731.446	674133	0,0096156	0,0198270	-0,31428084	
KAB. SUMENEP	972.340	966189	0,0127824	0,0284168	-0,34696131	
KOTA KEDIRI	20.493.883	238536	0,2694134	0,0070156	1,58435275	
KOTA BLITAR	2.045.625	123194	0,0268919	0,0036233	0,87051882	
KOTA MALANG	2.901.163	730768	0,0381388	0,0214928	0,24907509	
KOTA PROBOLINGGO	2.895.201	181431	0,0380604	0,0053361	0,85324966	
KOTA PASURUAN	2.080.632	158864	0,0273521	0,0046724	0,76745219	
KOTA MOJOKERTO	2.762.189	108045	0,0363118	0,0031777	1,05793116	
KOTA MADIUN	2.179.439	188344	0,0286510	0,0055394	0,71367544	
KOTA SURABAYA	5.035.254	2444976	0,0661937	0,0719096	-0,03597076	

Lampiran 8 Hasil Analisis Indeks Entropy Theil Tahun 2001

Kabupaten	y <sub>j</sub>	x <sub>j</sub>	y <sub>j</sub> /Y	x <sub>j</sub> /X	log (y <sub>j</sub> /Y)/(x <sub>j</sub> /X)	I(y)
KAB. PACITAN	738.528	543252	0,0097087	0,0158449	-0,21272854	0,489365
KAB. PONOROGO	783.880	898158	0,0103049	0,0261964	-0,40519760	
KAB. TRENGGALEK	627.871	671404	0,0082540	0,0195827	-0,37520807	
KAB. TULUNGAGUNG	1.295.875	972187	0,0170356	0,0283556	-0,22128091	
KAB. BLITAR	749.813	1101853	0,0098571	0,0321376	-0,51326472	
KAB. KEDIRI	1.044.950	1400292	0,0137370	0,0408421	-0,47321736	
KAB. MALANG	1.045.645	2399904	0,0137461	0,0699976	-0,70690397	
KAB. LUMAJANG	1.013.341	948671	0,0133214	0,0276697	-0,31745416	
KAB. JEMBER	921.230	2120074	0,0121105	0,0618358	-0,70807719	
KAB. BANYUAWANGI	1.219.339	1475438	0,0160295	0,0430338	-0,42889093	
KAB. BONDOWOSO	933.960	673129	0,0122779	0,0196330	-0,20386436	
KAB. SITUBONDO	1.243.354	600208	0,0163452	0,0175062	-0,02980117	
KAB. PROBOLINGGO	1.291.589	961190	0,0169793	0,0280349	-0,21777920	
KAB. PASURUAN	2.150.422	1225866	0,0282695	0,0357546	-0,10201365	
KAB. SIDOARJO	3.799.161	1293111	0,0499439	0,0377159	0,12195758	
KAB. MOJOKERTO	1.290.189	887831	0,0169609	0,0258952	-0,18377132	
KAB. JOMBANG	896.334	1135285	0,0117832	0,0331127	-0,44872929	
KAB. NGANJUK	778.509	1016030	0,0102343	0,0296344	-0,46173727	
KAB. MADIUN	815.891	654665	0,0107257	0,0190945	-0,25048101	
KAB. MAGETAN	901.686	683472	0,0118536	0,0199347	-0,22575986	
KAB. NGAWI	803.628	862533	0,0105645	0,0251574	-0,37681504	
KAB. BOJONEGORO	757.576	1191394	0,0099591	0,0347492	-0,54272341	
KAB. TUBAN	1.618.584	1027486	0,0212780	0,0299685	-0,14873499	
KAB. LAMONGAN	798.348	1210879	0,0104951	0,0353175	-0,52700254	
KAB. GRESIK	3.569.875	963816	0,0469297	0,0281115	0,22256463	
KAB. BANGKALAN	846.140	773500	0,0111234	0,0225605	-0,30711256	
KAB. SAMPANG	918.696	721869	0,0120772	0,0210546	-0,24138106	
KAB. PAMEKASAN	733.628	683916	0,0096443	0,0199477	-0,31562088	
KAB. SUMENEP	873.998	978763	0,0114896	0,0285474	-0,39526156	
KOTA KEDIRI	20.766.963	238955	0,2730033	0,0069696	1,59296259	
KOTA BLITAR	2.136.087	123778	0,0280811	0,0036102	0,89088121	
KOTA MALANG	2.942.129	743508	0,0386773	0,0216858	0,25128176	
KOTA PROBOLINGGO	2.905.324	181999	0,0381935	0,0053083	0,85703128	
KOTA PASURUAN	2.166.105	159796	0,0284757	0,0046607	0,78601929	
KOTA MOJOKERTO	2.931.593	108025	0,0385388	0,0031507	1,08748506	
KOTA MADIUN	2.266.028	189571	0,0297893	0,0055292	0,73139909	
KOTA SURABAYA	5.200.710	2463716	0,0683687	0,0718588	-0,02162225	



**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Variance
PDRB	37	256791,38	12866940	1567173,1	4,93E+12



Lampiran 11 Gambar Peta Jawa Timur

